



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DALAM
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2023**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 21);
20. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41);
21. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 78).

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dalam Kabupaten Simeulue;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue;
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
10. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa;
15. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa;
16. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten;
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa;
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023, dimaksudkan sebagai Pedoman

dalam.....

dalam menghitung besaran pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa secara proporsional, adil dan merata.

- (2) Tujuan Pengalokasian dan Penetapan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023 adalah untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan belanja tidak terduga.

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dalam Anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023 yaitu 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah total realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 635.708.497,80 (*Enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh sen*) berdasarkan besaran realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dasar sebesar Rp. 492.737.263,73 (*empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen*);
 - b. Alokasi Formula sebesar Rp. 142.971.234,07 (*seratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah nol tujuh sen*);
- (2) Pengalokasian bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 4

Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN dan PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dan/atau sekaligus sesuai dengan Penerimaan Kas Daerah.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Qanun Desa tentang APBDesa tahun berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahun sebelumnya.
 - c. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue tentang Realisasi Pembayaran Pajak Daerah terhutang dan tahun berjalan sesuai kegiatan yang dibiayai dari APBDesa serta Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan belanja tidak terduga;
- (2) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti.....

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa melalui Kepala Seksi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBDesa ditetapkan menjadi Qanun Desa tentang APBDesa.
- (4) Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebhendaharaan Desa wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN dan SANKSI

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya;

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Bupati dapat menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya Laporan tersebut;
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi Administratif kepada Desa yang bersangkutan;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya;

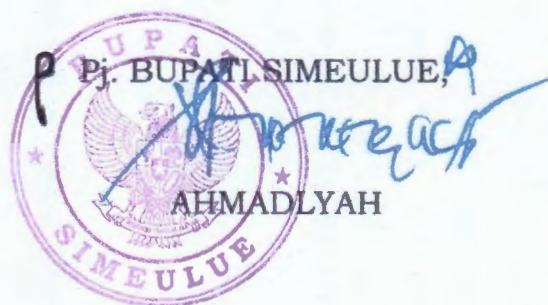
BAB.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

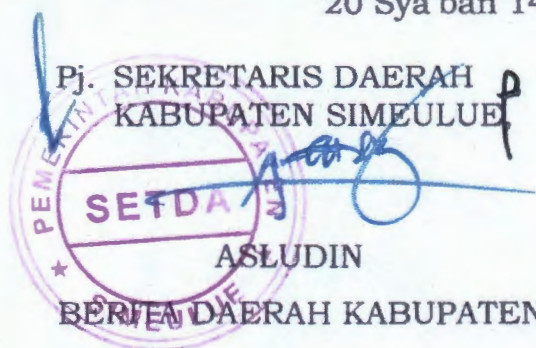
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 13 Maret 2023 M
20 Sya'ban 1444 H



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 13 Maret 2023 M
20 Sya'ban 1444 H



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 14

Lampiran - PERATURAN BUPATI SIMEULUE

Nomor : 13 Tahun 2023

Tanggal : 13 Maret 2023 M
20 Sya'ban 1444 H

Tentang : Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023.

**RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2023**

1	2	JUMLAH PAJAK	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH PAJAK	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH PROPORSIONAL	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL
		BAGI RATA			PROPORSIONAL			BAGI RATA DAN PROPORSIONAL	BAGI RATA DAN PROPORSIONAL	
		3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 3 + 6	10 = 4 + 7	11 = 9 + 10
1	KECAMATAN SIMEULUE TENGAH	48.960.151,34	8.168.806,77	57.128.958,11	10.720.323,62	555.577,38	11.275.901,01	59.680.474,97	8.724.384,15	68.404.859,12
1	WEL - WEL	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,753043	582.381,14	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
2	KAMPUNG AIE	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.053.307,86	404.411,09	1.457.718,95	4.113.317,32	914.961,51	5.028.278,83
3	LAMAYANG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381,14	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
4	LATITIK	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	622.918,50	10.077,75	632.996,25	3.682.927,96	520.628,18	4.203.556,13
5	LAUREE	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381,14	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
6	LAKUBANG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381,14	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
7	LAMBAYA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381,14	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
8	LAUKE	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.452.307,95	10.077,75	1.462.385,70	4.512.317,41	520.628,18	5.032.945,59
9	SITUFA JAYA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	622.918,50	10.077,75	632.996,25	3.682.927,96	520.628,18	4.203.556,13
10	DIHIT	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381,14	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
11	WELLANGKUM	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381,14	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
12	KUTA BARU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381,14	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
13	SEBBE	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	622.918,50	10.077,75	632.996,25	3.682.927,96	520.628,18	4.203.556,13
14	SUAK BARU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	622.918,50	10.077,75	632.996,25	3.682.927,96	520.628,18	4.203.556,13
15	LUAN SOREP	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381,14	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
16	PUTRA JAYA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381,14	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02

1	URAIAN	JUMLAH PAJAK	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH PAJAK	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH PROPORSIONAL	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL
		BAGI RATA			PROPORSIONAL			BAGI RATA DAN PROPORSIONAL	BAGI RATA DAN PROPORSIONAL	
2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 3 + 6	10 = 4 + 7	11 = 9 + 10	
II	KECAMATAN SALANG	48.960.151,34	8.168.806,77	57.128.958,11	10.289.353,36	161.244,05	10.450.597,41	59.249.504,70	8.330.050,82	67.579.555,52
	17 UJUNG SALANG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
	18 PADANG UNOI	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
	19 MEUNAFI	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.053.307,86	10.077,75	1.063.386	4.113.317,32	520.628,18	4.633.945,50
	20 NASREUHE	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	622.918,50	10.077,75	632.996	3.682.927,96	520.628,18	4.203.556,13
	21 MUTIARA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	622.918,50	10.077,75	632.996	3.682.927,96	520.628,18	4.203.556,13
	22 KARYA BAKTI	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	622.918,50	10.077,75	632.996	3.682.927,96	520.628,18	4.203.556,13
	23 TAMON JAYA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
	24 JAYA BARU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	622.918,50	10.077,75	632.996	3.682.927,96	520.628,18	4.203.556,13
	25 TAMENG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	883.853,38	10.077,75	893.931	3.943.862,84	520.628,18	4.464.491,02
	26 ALONG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	622.918,50	10.077,75	632.996	3.682.927,96	520.628,18	4.203.556,13
	27 PANTON LAWE	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
	28 LALLA BAHAGIA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
	29 SUAK MANANG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	608.557,46	10.077,75	618.635	3.668.566,92	520.628,18	4.189.195,09
	30 GANANG PUSAKO	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
	31 KENANGAN JAYA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	572.303,38	10.077,75	582.381	3.632.312,84	520.628,18	4.152.941,02
	32 BUNGA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	622.918,50	10.077,75	632.996	3.682.927,96	520.628,18	4.203.556,13
III	KECAMATAN TEUPAH BARAT	55.080.170,26	9.189.907,62	64.270.077,88	12.313.383,79	575.732,89	12.889.116,68	67.393.554,05	9.765.640,51	77.159.194,56
	33 SITAL	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	621.322,83	10.077,75	631.401	3.681.332,28	520.628,18	4.201.960,46
	34 LEUBANG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	570.707,71	10.077,75	580.785	3.630.717,17	520.628,18	4.151.345,35
	35 AWE SEUBAL	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	570.707,71	10.077,75	580.785	3.630.717,17	520.628,18	4.151.345,35
	36 LANTIK	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	621.322,83	10.077,75	631.401	3.681.332,28	520.628,18	4.201.960,46
	37 AWE KECIL	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	570.707,71	10.077,75	580.785	3.630.717,17	520.628,18	4.151.345,35
	38 NANCALA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	570.707,71	10.077,75	580.785,46	3.630.717,17	520.628,18	4.151.345,35
	39 MAUDIL	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	621.322,83	10.077,75	631.401	3.681.332,28	520.628,18	4.201.960,46
	40 INOR	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	570.707,71	10.077,75	580.785	3.630.717,17	520.628,18	4.151.345,35
	41 NAIPOS	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.102.327,30	10.077,75	1.112.405	4.162.336,76	520.628,18	4.682.964,94
	42 LA AYON	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	621.322,83	10.077,75	631.401	3.681.332,28	520.628,18	4.201.960,46
	43 ANGKEO	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.051.712,19	10.077,75	1.061.790	4.111.721,65	520.628,18	4.632.349,83
	44 BUNON	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	570.707,71	10.077,75	580.785	3.630.717,17	520.628,18	4.151.345,35
	45 SILENGAS	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	621.322,83	10.077,75	631.401	3.681.332,28	520.628,18	4.201.960,46
	46 SALUR LATUN	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	621.322,83	10.077,75	631.401	3.681.332,28	520.628,18	4.201.960,46
	47 SALUR LAENGALU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	621.322,83	10.077,75	631.401	3.681.332,28	520.628,18	4.201.960,46
	48 SALUR	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.193.807,71	404.411,09	1.598.219	4.253.817,17	914.961,51	5.168.778,68
	49 PULAU TEUPAH	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	570.707,71	10.077,75	580.785	3.630.717,17	520.628,18	4.151.345,35
	50 LEUBANG HULU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	621.322,83	10.077,75	631.401	3.681.332,28	520.628,18	4.201.960,46

1	URAIAN	JUMLAH PAJAK	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH PAJAK	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH PROPORSIONAL	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL
		BAGI RATA			PROPORSIONAL			BAGI RATA DAN PROPORSIONAL	BAGI RATA DAN PROPORSIONAL	
2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 3 + 6	10 = 4 + 7	11 = 9 + 10	
IV	KECAMATAN SIMEULUE TIMUR	52.020.160,80	8.679.357,19	60.699.517,99	26.193.231,40	34.978.319,48	61.171.550,89	78.213.392,20	43.657.676,68	121.871.068,88
	51 AIR PINANG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	598.491,16	325.364,03	923.855	3.658.500,62	835.914,45	4.494.415,07
	52 KUALA MAKMUR	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.478.495,73	325.364,03	1.803.860	4.538.505,19	835.914,45	5.374.419,64
	53 GANTING	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.130.110,75	325.364,03	1.455.475	4.190.120,21	835.914,45	5.026.034,66
	54 SEFOYAN	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	598.491,16	325.364,03	923.855	3.658.500,62	835.914,45	4.494.415,07
	55 LINGGI	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	649.106,27	325.364,03	974.470	3.709.115,73	835.914,45	4.545.030,18
	56 LUGU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.519.497,92	2.941.846,16	4.461.344	4.579.507,38	3.452.396,58	8.031.903,96
	57 SUKA KARYA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	2.184.991,73	7.649.237,36	9.834.229,09	5.245.001,19	8.159.787,78	13.404.788,98
	58 SUKA MAJU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	598.491,16	4.873.037,36	5.471.529	3.658.500,62	5.383.587,78	9.042.088,40
	59 SINABANG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	2.497.237,54	2.606.645,09	5.103.883	5.557.247,00	3.117.195,52	8.674.442,52
	60 SUKA JAYA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	2.092.119,71	2.679.351,76	4.771.471	5.152.129,17	3.189.902,18	8.342.031,35
	61 AMIRIA BAHAGIA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	3.771.492,31	1.830.771,76	5.602.264	6.831.501,76	2.341.322,18	9.172.823,95
	62 AIR DINGIN	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	3.771.492,31	6.137.026,16	9.908.518	6.831.501,76	6.647.576,58	13.479.078,35
	63 SUAK BULUH	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.519.497,92	2.494.111,76	4.013.610	4.579.507,38	3.004.662,18	7.584.169,56
	64 KOTA BATU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.089.108,56	769.046,51	1.858.155	4.149.118,02	1.279.596,93	5.428.714,95
	65 AMAITENG MULIA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	516.390,07	719.697,36	1.236.087	3.576.399,53	1.230.247,78	4.806.647,31
	66 UJUNG TINGGI	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.529.110,84	325.364,03	1.854.475	4.589.120,30	835.914,45	5.425.034,75
	67 PULAU SIUMAT	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	649.106,27	325.364,03	974.470	3.709.115,73	835.914,45	4.545.030,18
V	KECAMATAN TELUK DALAM	30.600.094,59	5.105.504,23	35.705.598,82	6.965.673,25	100.777,53	7.066.450,78	37.565.767,84	5.206.281,76	42.772.049,60
	68 SAMBAY	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	631.535,12	10.077,75	641.613	3.691.544,58	520.628,18	4.212.172,75
	69 BULU HADEK	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	631.535,12	10.077,75	641.613	3.691.544,58	520.628,18	4.212.172,75
	70 KUALA BARU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.071.537,40	10.077,75	1.081.615	4.131.546,86	520.628,18	4.652.175,04
	71 BABUSSALAM	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	580.920,01	10.077,75	590.998	3.640.929,46	520.628,18	4.161.557,64
	72 MUARA AMAN	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	631.535,12	10.077,75	641.613	3.691.544,58	520.628,18	4.212.172,75
	73 KUALA BAKTI	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	943.085,12	10.077,75	953.163	4.003.094,58	520.628,18	4.523.722,75
	74 LUGU SEKBAHAK	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	631.535,12	10.077,75	641.613	3.691.544,58	520.628,18	4.212.172,75
	75 LUAN BALU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	580.920,01	10.077,75	590.998	3.640.929,46	520.628,18	4.161.557,64
	76 TANJUNG RAYA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	631.535,12	10.077,75	641.613	3.691.544,58	520.628,18	4.212.172,75
	77 GUNUNG PUTIH	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	631.535,12	10.077,75	641.613	3.691.544,58	520.628,18	4.212.172,75

1	2	JUMLAH PAJAK	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH PAJAK	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH PROPORSIONAL	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL	
		BAGI RATA			PROPORSIONAL			BAGI RATA DAN PROPORSIONAL	BAGI RATA DAN PROPORSIONAL		
3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 3 + 6	10 = 4 + 7	11 = 9 + 10			
VI	KECAMATAN SIMEULUE BARAT	42.840.132,42	7.147.705,92	49.987.838,35	9.670.587,79	141.088,54	9.811.676,33	52.510.720,21	7.288.794,47	59.799.514,68	
	78	LHOK MAKMUR	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.970,07	10.077,75	635.048	3.684.979,53	520.628,18	4.205.607,71
	79	SANGGIRAN	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.970,07	10.077,75	635.048	3.684.979,53	520.628,18	4.205.607,71
	80	AMABAAN	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.970,07	10.077,75	635.048	3.684.979,53	520.628,18	4.205.607,71
	81	MITEUM	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.970,07	10.077,75	635.048	3.684.979,53	520.628,18	4.205.607,71
	82	MALASIN	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.105.974,55	10.077,75	1.116.052	4.165.984,01	520.628,18	4.686.612,19
	83	LAMAMEK	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.970,07	10.077,75	635.048	3.684.979,53	520.628,18	4.205.607,71
	84	SIGULAI	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.064.972,36	10.077,75	1.075.050	4.124.981,82	520.628,18	4.645.609,99
	85	SEMBILAN	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.970,07	10.077,75	635.048	3.684.979,53	520.628,18	4.205.607,71
	86	LAYABAUNG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.970,07	10.077,75	635.048	3.684.979,53	520.628,18	4.205.607,71
	87	UJUNG HARAPAN	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.970,07	10.077,75	635.048	3.684.979,53	520.628,18	4.205.607,71
	88	LHOK BIKHAO	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.970,07	10.077,75	635.048	3.684.979,53	520.628,18	4.205.607,71
	89	BATU RAGI	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.970,07	10.077,75	635.048	3.684.979,53	520.628,18	4.205.607,71
	90	BABUL MAKMUR	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.970,07	10.077,75	635.048	3.684.979,53	520.628,18	4.205.607,71
	91	SINAR BAHAGIA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.970,07	10.077,75	635.048	3.684.979,53	520.628,18	4.205.607,71
VII	KECAMATAN TEUPAH SELATAN	58.140.179,72	9.700.458,04	67.840.637,77	12.054.765,26	191.477,31	12.246.242,56	70.194.944,98	9.891.935,35	80.086.880,33	
	92	SUAK LAMATAN	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.404,12	10.077,75	634.482	3.684.413,58	520.628,18	4.205.041,76
	93	LATIUNG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	573.789,01	10.077,75	583.867	3.633.798,47	520.628,18	4.154.426,64
	94	LABUHAN BAJAU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.404,12	10.077,75	634.482	3.684.413,58	520.628,18	4.205.041,76
	95	ANA AO	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.404,12	10.077,75	634.482	3.684.413,58	520.628,18	4.205.041,76
	96	LATALING	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	573.789,01	10.077,75	583.867	3.633.798,47	520.628,18	4.154.426,64
	97	P. BENGKALAK	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	1.504.408,69	10.077,75	1.514.486	4.564.418,15	520.628,18	5.085.046,33
	98	ALUS - ALUS	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	573.789,01	10.077,75	583.867	3.633.798,47	520.628,18	4.154.426,64
	99	SEUNEBOK	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.404,12	10.077,75	634.482	3.684.413,58	520.628,18	4.205.041,76
	100	BATU RALANG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.404,12	10.077,75	634.482	3.684.413,58	520.628,18	4.205.041,76
	101	ULUL MAYANG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	573.789,01	10.077,75	583.867	3.633.798,47	520.628,18	4.154.426,64
	102	PASIR TINGGI	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.404,12	10.077,75	634.482	3.684.413,58	520.628,18	4.205.041,76
	103	LABUHAN BAKTI	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	573.789,01	10.077,75	583.867	3.633.798,47	520.628,18	4.154.426,64
	104	KEBUN BARU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.404,12	10.077,75	634.482	3.684.413,58	520.628,18	4.205.041,76
	105	BADEGONG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	573.789,01	10.077,75	583.867	3.633.798,47	520.628,18	4.154.426,64
	106	LABUHAN JAYA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.404,12	10.077,75	634.482	3.684.413,58	520.628,18	4.205.041,76
	107	BLANG SEBEL	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	573.789,01	10.077,75	583.867	3.633.798,47	520.628,18	4.154.426,64
	108	TRANS JERNGE	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.404,12	10.077,75	634.482	3.684.413,58	520.628,18	4.205.041,76
	109	TRANS BARU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	289.792,31	10.077,75	299.870	3.349.801,77	520.628,18	3.870.429,95
	110	TRANS MARANTI	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	624.404,12	10.077,75	634.482	3.684.413,58	520.628,18	4.205.041,76

1	URAIAN	JUMLAH PAJAK	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH PAJAK	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH PROPORSIONAL	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL
		BAGI RATA			PROPORSIONAL			BAGI RATA DAN PROPORSIONAL	BAGI RATA DAN PROPORSIONAL	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 3 + 6	10 = 4 + 7	11 = 9 + 10
VIII	KECAMATAN ALAFAN	24.480.075,67	4.084.403,39	28.564.479,06	5.098.236,28	80.622,02	5.178.858,30	29.578.311,95	4.165.025,41	33.743.337,36
	111 LAFAKHA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	637.279,53	10.077,75	647.357	3.697.288,99	520.628,18	4.217.917,17
	112 LHOK DALAM	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	637.279,53	10.077,75	647.357	3.697.288,99	520.628,18	4.217.917,17
	113 LUBUK BAIK	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	637.279,53	10.077,75	647.357	3.697.288,99	520.628,18	4.217.917,17
	114 LANGI	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	637.279,53	10.077,75	647.357	3.697.288,99	520.628,18	4.217.917,17
	115 LHOK PAUH	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	637.279,53	10.077,75	647.357	3.697.288,99	520.628,18	4.217.917,17
	116 LAMEREM	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	637.279,53	10.077,75	647.357	3.697.288,99	520.628,18	4.217.917,17
	117 LEWAK	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	637.279,53	10.077,75	647.357	3.697.288,99	520.628,18	4.217.917,17
	118 SERAFON	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	637.279,53	10.077,75	647.357	3.697.288,99	520.628,18	4.217.917,17
IX	KECAMATAN TEUPAH TENGAH	36.720.113,51	6.126.605,08	42.846.718,58	7.338.560,78	515.266,37	7.853.827,15	44.058.674,29	6.641.871,45	50.700.545,74
	119 LABUAH	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	577.090,40	10.077,75	587.168	3.637.099,85	520.628,18	4.157.728,03
	120 NANCAWA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	577.090,40	10.077,75	587.168	3.637.099,85	520.628,18	4.157.728,03
	121 ABAIL	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	577.090,40	10.077,75	587.168	3.637.099,85	520.628,18	4.157.728,03
	122 SIMPANG ABAIL	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	577.090,40	10.077,75	587.168	3.637.099,85	520.628,18	4.157.728,03
	123 MATANURUNG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	939.951,32	10.077,75	950.029	3.999.960,78	520.628,18	4.520.588,95
	124 LANTING	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	577.090,40	10.077,75	587.168	3.637.099,85	520.628,18	4.157.728,03
	125 LASIKIN	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	577.090,40	404.411,09	981.501	3.637.099,85	914.961,51	4.552.061,36
	126 SUA-SUA	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	577.090,40	10.077,75	587.168	3.637.099,85	520.628,18	4.157.728,03
	127 BATU-BATU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	577.090,40	10.077,75	587.168	3.637.099,85	520.628,18	4.157.728,03
	128 SITUBUK	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	577.090,40	10.077,75	587.168	3.637.099,85	520.628,18	4.157.728,03
	129 BUSUNG INDAH	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	627.705,51	10.077,75	637.783	3.687.714,97	520.628,18	4.208.343,14
	130 KAHAD	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	577.090,40	10.077,75	587.168	3.637.099,85	520.628,18	4.157.728,03

1	URAIAN	JUMLAH PAJAK	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH BAGI RATA	JUMLAH PAJAK	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH PROPORSIONAL	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL
		BAGI RATA			PROPORSIONAL			BAGI RATA DAN PROPORSIONAL	BAGI RATA DAN PROPORSIONAL	
	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 3 + 6	10 = 4 + 7	11 = 9 + 10
X	KECAMATAN SIMEULUE CUT	24.480.075,67	4.084.403,39	28.564.479,06	4.946.390,94	80.622,02	5.027.012,96	29.426.466,61	4.165.025,41	33.591.492,02
	131 BORENGAN	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	637.279,53	10.077,75	647.357	3.697.288,99	520.628,18	4.217.917,17
	132 UJUNG PADANG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	586.664,42	10.077,75	596.742	3.646.673,88	520.628,18	4.167.302,06
	133 LATAK AYAH	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	586.664,42	10.077,75	596.742	3.646.673,88	520.628,18	4.167.302,06
	134 KUTA PADANG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	637.279,53	10.077,75	647.357	3.697.288,99	520.628,18	4.217.917,17
	135 KUTA INANG	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	637.279,53	10.077,75	647.357	3.697.288,99	520.628,18	4.217.917,17
	136 AMARABU	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	637.279,53	10.077,75	647.357	3.697.288,99	520.628,18	4.217.917,17
	137 SIBULUH	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	586.664,42	10.077,75	596.742	3.646.673,88	520.628,18	4.167.302,06
	138 BUBUHAN	3.060.009,46	510.550,42	3.570.559,88	637.279,53	10.077,75	647.357	3.697.288,99	520.628,18	4.217.917,17
	138 Desa	422.281.305,32	70.455.958,40	492.737.263,73	105.590.506,48	37.380.727,60	142.971.234,07	527.871.811,80	107.836.686,00	635.708.497,80

